BAB III

DINAMIKA MASALAH ANAK DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang konflik Israel-Palestina serta dinamika masalah tentang anak dalam konflik. Penulis akan memulai dengan sejarah konflik Israel-Palestina kemudian penulis akan menjelaskan mengenai dampak-dampak dari konflik yang diterima oleh anak-anak.

A. Sejarah konflik Israel-Palestina

Berawal dari kongres Zionis pertama di Basel pada agustus 1897.Pada kongres itu organisasi zionis mengagendakan yang utama adalah pendirian negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Rencana strategis Zionis ini diprakarsai oleh pelobi top Zionis (*Chief Zionist Negotiator*), Dr. C. Wheizmann dan mendapatkan dukungan dari Zionis British. Di bawah komandonya, para kaum Yahudi berhasrat untuk mencapai agenda utamanya yaitu mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Untuk mencapai agenda utamanya, menurut Mohd. Roslan Mohd. Nor ada empat hal yang diprogramkan (Nor, 2010, p. 75):

1. Melakukan promosi, mengikuti kesesuaian tentang penjajahan di Palestina melalui sistem pertanian yahudi dan pekerja industri
2. Mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh tentara yahudi dengan cara menguasai institusi, tempatan atau antar bangsa dengan mengikuti undang-undang setiap negara
3. Menguatkan dan meningkatkan kesadaran dan sentiment kebangsaan yahudi

4. Melakukan persediaan untuk pengiktarafan kerajaan, jika perlu untuk menjalankan tujuan serta agenda zionis.

Sejak setelah kongres zionis pertama tersebut, memang banyak imigran yahudi yang berdatangan ke Palestina sebagai bentuk perjuangan kaum yahudi untuk mewujudkan mimpi mendirikan negara yahudi di tanah Palestina. Berbagai gelombang imigran berdatangan ke Palestina. Gelombang imigrasi massal berdatangan dari berbagai negara seperti Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, Jerman dan negara-negara afrika (M. Riza Sihbudi, 1993, p. 45).

Deklarasi Balfour ialah surat yang dikirim tanggal 2 november 1917 dari Menteri Luar Negeri Britania Raya/ Inggris Arthur James Balfour kepada Lord Rothcschil, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis. Surat itu menyatakan posisi yang disetujui pada rapat kabinet Inggris pada oktober 1917, bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis untuk membuat “tanah air” bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas yang ada disana.

Pada saat itu sebagian besar wilayah Palestina masih berada di bawah kekuasaan Ottoman Turki. Namun, dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour yang menjajikan kampung halaman bagi para Yahudi para Zionis menjadi yakin dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan langkah awal bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara Israel di tanah Palestina.

Pada Perang Dunia I, Inggris berhasil mendapatkan kemenangan yang kemudian daerah-daerah yang berada pada teritori Jerman dan Ottoman diberlakukan sistem mandat oleh liga bangsa-bangsa. Sistem mandat yang berlaku pada kala itu merupakan sistem yang mengatur daerah-daerah kekuasaan atau berada di teritorial Jerman dan Ottoman akan diambil alih atau dikuasai oleh negara pemenang Perang Dunia 1. Palestina merupakan tanah yang sistem mandatnya pada saat itu diberikan kepada Inggris.Untuk menempati janji Inggris kepada kaum Yahudi maka Inggris menjadikan Palestina sebagai rumah bagi para kaum Yahudi.

Gambar 1. Sistem Mandat Inggris di Tanah Palestina

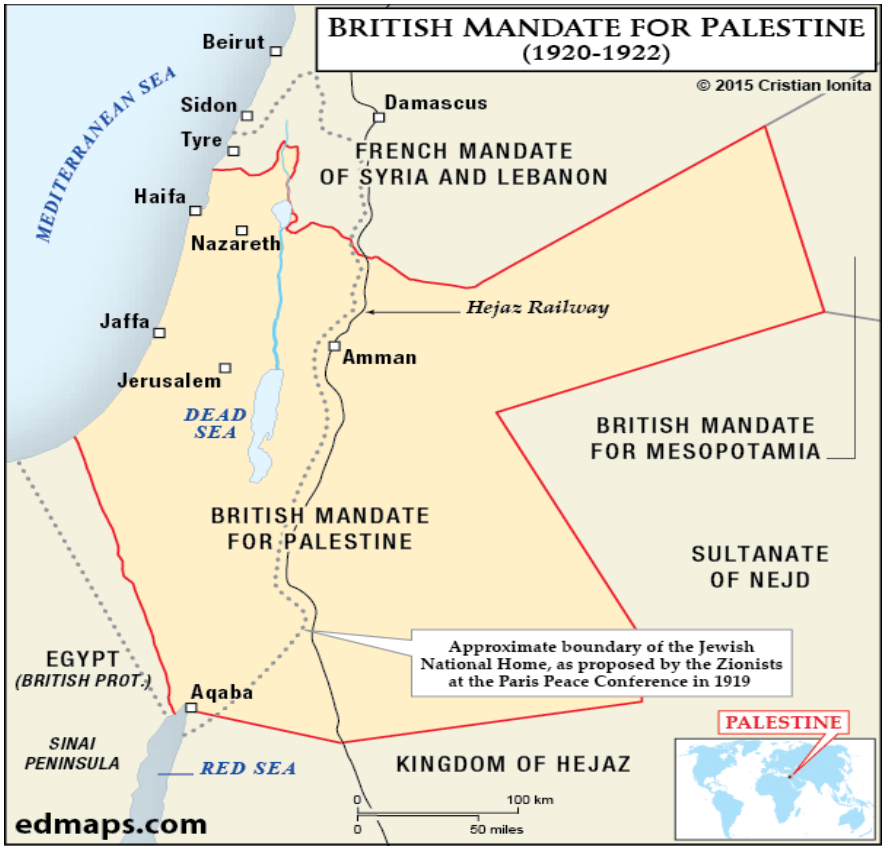

Source: www.edmaps.com Palestine: From Balfour to Netanyahu & Abbas

Setelah Dekalarasi Balfour dan mandat dari Inggris diberikan, para imigran Yahudi dari berbagai penjuru dunia terus berdatangan menuju tanah Palestina yang dijanjikan sebagai tanah air para Yahudi dan bahkan meningkat setiap tahunnya. Dukungan dari Inggris membuat Israel semakin leluasa bergerak dalam ekspansi wilayah dan menyebarkan ajaran Yahudi. Pergerakan kaum Yahudi menuju Palestina berlanjut Hingga Perang Dunia ke II yang kebanyakan imigran Yahudi didominasi oleh orang-orang eropa yang khawatir dengan sikap para Nazi yang berniat untuk membinasakan para kaum Yahudi dan bangsa-bangsa yang dianggap inferior oleh Jerman dengan tujuan untuk dapat mengangkat derajat bangsa Arya sebagai bangsa dengan kedudukan tertinggi (Smith, 2001, p. 167).

Perselisihan antar penduduk asli Palestina dan para imigran Yahudi yang berdatangan terus terjadi. Kedatangan para kaum Yahudi menuju Palestina ini secara otomatis menambah populasi penduduk di Palestina sehingga memicu berbagai konflik antar penduduk Yahudi dan warga asli Palestina. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi pemberontakan oleh warga asli Palestina terhadap para imigran Yahudi yang berdatangan.

Melihat kejadian tersebut, negara-negara Arab tidak tinggal diam, mereka mulai ikut campur dalam permasalahan yang melibatkaan Palestina tersebut. Berbagai penolakan mulai bermunculan dari negara-negara Arab, sehingga mulai terjadi krisis di Palestina. Melihat kondisi krisis di Palestina, Inggris yang pada saat itu kemudian menyerahkan mandat teritorialnya kepada PBB setelah berakhirnya Perang Dunia II, karena melihat permasalahan yang ada di Palestina

sudah sangat rumit sehingga lebih baik diserahkan kepada PBB untuk menemukan solusinya.

PBB melalui *United Nations Special Committee On Palestine* (UNSCOP), sebuah lembaga khusus yang dibentuk PBB yang bertujuan untuk melakukan investigasi yang kemudian diharapkan dapat memberikan solusi bagi penyelesaian masalah yang terjadi di Palestina. UNSCOP merekomendasikan pemisahan dan pembagian wilayah untuk kedua pihak yakni Israel dan Palestina menjadi dua teritori yang berbeda. Akan tetapi, solusi yang ditawarkan oleh PBB melalui UNSCOP ini mendapatkan penolakan keras dari negara-negara Arab.Penolakan dilakukan atas dasar bahwa, apabila negara-negara Arab mendukung pemisahan wilayah untuk Israel dan Palestina maka Israel dapat dengan mudah mendapatkan legitimasi untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina.

Keputusan PBB untuk membagi wilayah teritori bagi Israel dan Palestina membuat para kaum Yahudi yang berada di tanah Israel semakin percaya diri dalam mendirikan tanah air mereka. Selang beberapa waktu setelah Perang Dunia II berakhir, pada tanggal 14 Mei 1948, Israel dan kaum Yahudinya yang merasa memiliki kekuatan dan syarat untuk mendirikan sebuah negara akhirnya mendeklarasikan negara Israel dengan wilayah teritori yang telah ditentukan oleh PBB dalam *Partition Plan* (Halliday, 2005, p. 111). Amerika Serikat memberikan respon dengan mengakui kemerdekaan Israel secara *de facto* disusul Uni Soviet yang ikut mengakui kemerdekaan Israel secara *de jure* pada tanggal 15 Mei 1948.

Pada tanggal 15 Mei 1948, negara-negara Arab yang terdiri dari Lebanon, Mesir, Irak, Syria, dan Jordania menggerakan pasukan-pasukannya menuju

Palestina. Hal ini dilakukan untuk merespon tindakan Israel yang mendeklarasikan kemeredekaannya sebagai sebuah negara. Negara-negara arab setuju untuk menyatakan perang terhadap Israel yang kemudian ini menjadi lembar baru dalam peperangan di wilayah Timur Tengah. Perang ini disebut perang Arab-Israel.

PBB berhasil menghentikan penyerangan pertama yang dilakukan oleh negara-negara Arab ke Israel. Kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dengan percaya diri yang tinggi, Mesir dan Syria sangat yakin akan memenangkan peperangan dengan Israel nantinya. Akan tetapi, tanpa disadari kekuatan militer dan Persiapan Israel jauh lebih baik dari yang dibayangkan.Israel sudah mempersiapkan segalanya ketika mereka mendeklerasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka.

Israel berhasil memenangkan perang kedua melawan negara-negara arab pada 6-19 Juli 1948. Israel juga berhasil mengambil alih wilayah Galilea barat yang pada saat itu masih termasuk dalam wilayah Arab. Usaha PBB dalam melakukan perdamaian antar kedua pihak gagal akibat kebijakan luar negeri Israel yang ekspansionisme membuat perdamaian tersebut gagal. Israel mengambil wilayah diluar dari yang diatur dalam *partition plan*. PBB menetapkan 56% wilayah Israel di Palestina, akan tetapi Israel menguasai 80% dari wilayah tersebut. Pada oktober 1948 Israel melakukan invasi ke daerah Negev yang kemudian menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan Israel. Pada tahun yang sama, Israel berhasil mengusir pasukan Jordania hingga Laut Merah (Smith, 2001, p. 201).

Perang Arab-Israel pada 1948 ini berakhir dengan penandatangan gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Syria, Libanon dan Jordania yang dimediasi oleh pada tahun1949. Meskipun telah menyepakati adanya gencatan senjata oleh pihak-pihak yang berperang, hal tersebut tidak mengarah kepada kesepakatan untuk damai. Perang Arab-Israel kembali terjadi setidaknya di 3 periode berbeda yaitu pada 1956 di Terusan Suez, 1967 *The six day war* dan yang terakhir 1973 (Slater, 2001, p. 172).

Tahun 1956, perang terjadi di Terusan Suez yang memperlibatkan Mesir, Israel, Perancis, dan Inggris. Pada saat itu keterlibatan Inggris dan Perancis disebabkan oleh perlakuan Mesir yang memblokir jalur kapal-kapal yang melalui Terusan Suez menuju Israel. Pemblokiran ini tidak hanya merugikan Israel saja, akan tetapi juga memutus jalur perdagangan Inggris dan Perancis. Tak senang dengan perlakuan Mesir, Israel dibantu oleh Inggris dan Perancis melakukan invasi menuju Terusan Suez untuk mengakhiri penguasaan Mesir di Terusan Suez pada November 1956 dan menarik kembali pasukannya atas tekanan dari Amerika Serikat pada maret 1957 (Smith, 2001, p. 223).

Perang Arab-Israel berikutnya yaitu pada tahun 1967, perang ini disebut *The Six Day War* karena berlangsung selama enam hari dan bertempat di Semenanjung Sinai. Negara yang terlibat ialah Israel, Mesir dan Syria.Israel menyerang Syria karena Syria dianggap memberikan dukungan terhadap Palestna dan dianggap berbahaya oleh Israel. Pada perang enam hari ini Syria dibantu penuh oleh pasukan militer Mesir, namun tak dapat membendung kekuatan pasukan Israel dan Israel pun memenangkan perang enam hari ini. Israel berhasil

menduduki wilayah Semenanjung Sinai, Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

PBB tak tinggal diam melihat perang enam hari yang terjadi antara Israel dengan Mesir dan Syria.Resolusi No. 242 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan peperang tersebut. Resolusi tersebut berisi tentang menarik mundur pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya serta menghendaki adanya penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara yang berada di wilayah Timur Tengah serta menghormati hak negara untuk hidup damai (Shlaim, 1994, p. 25). Akan tetapi Israel tidak setuju dengan Resolusi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut, Israel tetap menjajah wilayah yang berhasil mereka kuasai hingga pada saat dicapainya kesepakatan Camp David pada tahun 1979 (Slater, A Palestinian State and Israeli Security, 1991, p. 412).

Kekhawatiran akan keberadaan pemukiman Israel yang semakin meningkat serta keinginan untuk membalas dendam atas kekalahan perang yang terjadi pada perang sebelumnya, memicu perang yang terjadi pada tahun 1973 antara Mesir dan Syria melawan Israel. Mesir dan Syria menyerang pemukiman Israel pada hari suci kaum Yahudi atau Yom Kippur pada 6 oktober 1973. Perang ini sering disebut perang Yom Kippur. Namun kegagalan Mesir dan Syria kembali dialami, Israel sudah siap dengan segala yang terjadi apabila Mesir dan Syria menyerang. Israel berhasil menang dalam perang tersebut dan menambah wilayah kekuasaannya di Terusan Suez (Smith, 2001, p. 226). Dewan keamanan PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi No. 338 pada tanggal 22 Oktober 1973 yang

berisi tentang pelaksanaan negosiasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam perang berdasarkan pada resolusi No. 242 (Shlaim, 1994, p. 25). Perang Yom Kippor pun berakhir sampai disitu.

Pada tahun 1978, dibentuklah perjanjian damai antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan mantan Perdana Menteri Israel Menachem Begin setelah 12 hari perundingan di rumah peristirahatan kepresidenan 'Camp David' di Maryland, dekat ibukota Amerika Serikat (Washington), hal tersebut berlaku sebab negosiasi dan penandatanganan perjanjian di bawah pengawasan mantan Presiden Amerika Sarikat Jimmy Carter (ASPAC, 2017).

Pada tahun 1979 akhirnya kesepakatan berhasil diraih oleh kedua pihak yang berperang yakni Israel dan Mesir. Namun, kesepakatan Camp David tersebut pada kenyataanya tidak sedamai yang dibayangkan.Sampai pada saat ini Israel masih menjajah para penduduk Palestina dan banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Banyaknya operasi militer yang dilakukan oleh Israel menyebabkan pemberontakan dilakukan oleh rakyat Palestina. Sampai saat ini walaupun banyak percobaan untuk melakukan perdamaian seperti “kesepakatan perdamaian Oslo” dan percobaan perdamaian lainnya yang diusahakan oleh PBB dan negara-negara lain akan tetapi hanya bertahan beberapa saat saja dan konflik yang serupa bermunculan kembali.

Operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Israel ini mengalami banyak pelanggaran HAM khususnya yang diterima oleh anak. Setidaknya sejak tahun 2006 hingga saat ini, lebih dari 6 kali operasi militer yang dilakukan oleh Israel

yang menelan banyak korban warga sipil termasuk anak-anak. Sampai saat ini konflik Israel dengan Palestina belum menemukan titik damai.

B. Dampak konflik Israel-Palestina terhadap anak

Dalam situasi konflik, anak-anak secara langsung ikut terlibat di dalamnya, karena mereka merupakan bagian dalam konflik. Pada konflik Israel-Palestina, data yang di peroleh dari B'Tselem tercatat dari tahun 1987 sampai dengan 2011 korban yang tewas pada konflik ini adalah 9.481 jiwa yang 1.762 nya ialah anak-anak (B'Tselem, 2012). Kemudian pada tahun 2012 berdasarkan data dari *Defense For Childern International Palestine* (DCI) dalam operasi militer yang dilakukan oleh Israel bernama*Operation Pillar of Defense* menyebabkan 305 anak meninggal dunia (Palestine, 2014). Tidak hanya korban yang meninggal saja, banyak anak yang terluka, disiksa, kehilangan orang tua, cacat dan lain sebagainya. Penderitaan mereka beragam-beragam, Hal ini dapat berdampak buruk terhadap masa depan anak dalam situasi konflik seperti ini. Ada beberapa dampak konflik bersenjata terhadap anak.Yaitu dampak sosial dan ekonomi, dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak struktur keluarga dan masyarakat, dan dampak kesehatan terhadap anak serta anak-anak dijadikan sebagai tahanan militer.

1. Dampak sosial dan ekonomi

Konflik bersenjata mempunyai pengaruh yang signifikan struktur sosial dan ekonomi. Sebuah tatanan sosial dapat sangat terpengaruh akibat anggota keluarganya terbunuh, terluka, atau terpisah saat terjadinya konflik (Kendra U, 2010, p. 23). Dari data yang didapatkan dari *Office for the Coordination of*

Humatarian Affairs (OCHA) pada periode September 2014, operasi militer yang dilakukan oleh Israel bernama *Operation Protective Edge* telah menelan 11.100 korban, 3.374 merupakan anak-anak. Dari jumlah korban anak tersebut sekitar 1.500 anak merupakan anak yatim (UNOCHA, 2014, p. 2). Hal ini dapat berpengaruh pada peran seorang anak apabila orangtuanya meninggal, terluka ataupun terpisah dari mereka. Mereka dengan umur yang masih muda sudah harus menjadi tulang punggung keluarga. Anak-anak harus bisa mencari uang atau makanan untuk melanjutkan hidup mereka, adik-adik mereka dan keluarga. Dari kasus seperti ini, anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya akibat perang akan sangat membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk mengsejahterahkan mereka.

Adapun dampak sosial ekonomi yang diterima oleh anak dalam konflik bersenjata selain harus menghidupi diri sendiri maupun keluarga yaitu terpaksa dan/atau dipaksa dipindahkan ke tempat/negara lain atau menjadi pengungsi karena kondisi negara mereka yang tidak kondusif untuk tinggal. Pengungsi ialah seseorang yang secara paksa diusir dari negara asalnya dan tinggal di negara lain (Kendra U, 2010, p. 24). Pada agustus 2014 tercatat ada 22 sekolah hancur total dan 118 sekolah mengalami kerusakan berat akibat serangan Israel ke Gaza. Serangan ini juga menghancurkan 18.000 unit rumah yang membuat sekitar 108.000 warga tidak memiliki tempat tinggal. Akibat kejadian ini pula sekitar 485.000 warga palestina mengungsi ketempat lain (UNOCHA, 2014, p. 3).

Menjadi pengungsi bagi seorang anak merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi mereka. Selain harus mengungsi dari tempat tinggal mereka, anak

tersebut juga harus menghadapi tantangan yang signifikan saat menjalani pengungsian dan tumbuh dalam kondisi yang tidak normal diantara lain adalah kesulitan dalam mengamankan kebutuhan dasar mereka seperti mendapatkan makanan yang memadai, air minum bersih, tempat tinggal yang layak dan pakaian untuk dipakai sehari-hari (Harrell-Bond, 1986). Dengan hidup dalam ketegangan dan minimnya keamanan membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Mereka juga harus berebutan dengan pengungsi lain untuk mendapatkan makanan, minuman dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.

2. Dampak pendidikan

Pendidikan merupakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang lain akan tetapi bisa juga secara otodidak (Dewey, 1944, pp. 1-4). Pendidikan sangat penting bagi anak-anak apalagi dalam masa pertumbuhan, karena pendidikan dapat membentuk dan membangun karakter seorang anak untuk masa depannya. Dalam kehidupan normal, pendidikan yang diterima oleh anak-anak pada umumnya ialah pendidikan akademik di sekolah secara formal dan ekstrakurikuler atau yang non-akademik. Namun bagaimana dengan pendidikan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Mengamankan diri sendiri saja sudah susah apalagi mau mencari atau mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam situasi konflik para penduduk lebih mengutamakan keselamatan dibandingan hal yang lain. Anak-anak dan para remaja dapat kehilangan kesempatan bersekolah atau meraih pendidikan karena beberapa alasan. Sekolah

dianggap tidak relevan apabila kebutuhan kelangsungan hidup lebih mendesak. Dengan konflik yang berkepanjangan, semakin besar kemungkinan bahwa pendapatan keluarga berkurang, hilang atau tidak ada sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini memaksa para anak-anak dan remaja untuk terlibat dalam kegiatan mencari nafkah untuk membantu keluarga dibandingkan mengurusi pendidikan atau belajar. Kemudian yang berikutnya ialah ketakutan orang tua akan keselamatan anak apabila mereka berada jauh dari jangkauan orang tua untuk pergi belajar di sekolah atau di tempat yang disediakan untuk belajar pada situasi konflik (Kendra U, 2010, p. 33).

Pada konflik Israel-Palestina sendiri, berdasarkan data dari OCHA pada agustus 2014 terdapat lebih dari 22 sekolah hancur total dan 118 sekolah rusak berat (UNOCHA, 2014). Seperti yang kita ketahui bahwasannya sekolah merupaka sarana untuk dapat menimba ilmu pengetahuan dan tempat untuk belajar.Akan tetapi sarana tersebut hancur dan tidak bisa digunakan untuk belajar. Sebenarnya masih ada banyak sekolah yang masih baik bangunanya, akan tetapi fungsi gedung sekolah tersebut digunakan untuk tempat pengungsian warga.

Didalam konvensi hak-hak anak dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan pada pasal 28 CRC. Namun dalam situasi konflik pendidikan yang layak sangat sulit untuk diraih.Namun biasanya pada situasi konflik seperti konflik Israel-Palestina ini biasanya dalam memfasilitasi pendidikan ini dibutuhkan peran-peran dari LSM internasional sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan. Akan tetapi pada konflik Israel-Palestina hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena hanya sedikit dari para tenaga kerja

pengajar atau guru yang sukalera untuk mengajar dalam kondisi perang. Kondisi yang tidak aman menjadi penyebab para tenaga pengajar kurang tersedia dalam kondisi konflik. Dampak terhadap pendidikan anak-anak dalam kondisi konflik ialah mereka tidak mempunyai kesempatan seperti anak-anak normal pada umumnya untuk berkumpul, bermain dan bertukarpikiran dengan anak-anak lainnya. Karena beberapa fungsi dari perndidikan normal ialah belajar bagaimana mengerti, berkembang dan maju secara sosial, ekonomi, politik dan aspek pendidikan yang lainnya.

3. **Dampak ekonomi**

Bagi anak-anak dan remaja , konsekuensi dan dampak dari konflik bersifat sangat luas dan bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi perang membuat ekonomi negara sangat terganggu, karena negara harus memprioprtaskan keamanan daripada yang lainnya. Dalam kondisi perang pun sistem ekonomi sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik. Peluang kerja untuk mendapatkan pendapatan seperti bertani, berjualan di pasar, bekerja di kantor dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan ketika situasi dalam kondisi perang.

Dalam jangka waktu pendek konsekuensi ekonomi dari perang terhadap anak terdapat pada penanggungjawab ekonomi keluarga. Dengan kata lain, anak ikut mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun dalam jangka waktu yang panjang konsekuensi ekonomi yang dirasakan oleh anak adalah ketika mereka hidup dan tumbuh disaat perang dengan kondisi negara yang hancur, maka ketika besar nanti mereka juga ikut

berperan dalam membangun negara mereka karena mereka merupakan penerus bangsa. Kemunduran dan kehancuran ekonomi suatu negara akibat perang memang sangat sulit untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Lapangan kerja yang sangat minim dan kebanyakan makanan dan minuman mereka dapat dari sumbangan dan donasi dari orang-orang luar yang memberikan sumbangan (Kendra U, 2010, p. 41). Hal ini juga berdampak pada masa depan anak apabila hidup dan tumbuh besar dalam situasi miskin dan berkonflik.

4. Dampak perang terhadap struktur keluarga dan masyarakat

Anak-anak dan remaja tidak tumbuh dengan sendirinya.Mereka dibesarkan oleh keluarga dan hidup bermasyarakat. Keluarga tersebut juga bertanggungjawab untuk mengsejahterakan dan mengembangkan anak secara fisik, sosial, ekonomi maupun intelektual. Salah satu dampak ataupun konsekuensi dari perang terhadap anak-anak ialah tercerai-berai atau terpisah dari keluarga dan masyarakat, dalam hal ini keluarga besar yang mecakup kakek, nenek, sepupu, paman, bibi, saudara kandung dan lain-lain tidak hanya keluarga inti saja.

Anak-anak yang terpisah dari keluarga pada kondisi perang biasanya pada awalnya mereka akan diurus oleh paman, bibi, sepupu atau anggota keluarga besar lainnya atau bahkan bisa saja mereka akan diurus oleh tetangga. Dengan kasus seperti ini maka, anak akan memiliki peran dan membentuk karakter baru dalam kehidupannya. Anak tersebut akan keluar dari budaya yang sudah dibangun oleh keluarga inti dan hidup dengan kebiasaan serta budaya yang baru di dalam keluarga barunya. Memang sudah menjadi kewajiban bagi sesama saudara untuk saling melindungi dan menjaga saudaranya agar bisa melanjutkan hidup

melanjutkan hidup. Perubahan struktur keluarga, lingkungan dan masyarakat yang baru bagi anak merupakan tantangan tersendiri bagi mereka.

5. **Dampak kesehatan**

Masalah kesehatan yang diakibatkan oleh perang terhadap anak-anak ini terbagi menjadi dua yaitu kesehatan secara fisik dan kesehatan secara mental. Perang memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kesehatan fisik anak-anak maupun orang dewasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak bisa menjadi korban langsung dalam konflik jika mereka terbunuh atau terluka.Mereka bisa saja terkena tembakan, bom atau ranjau darat dan bisa saja dilukai secara langsung oleh para tentara militer (Levy, 2002, p. 114). Pada konflik Israel-Palestina berdasarkan data OCHA pada September 2014 dari 3.374 anak-anak korban yang masih hidup diperkirakan sekitar 1.000 anak mengalami cacat permanen (UNOCHA, 2014). Bentuk cacatnya pun bermacam-macam seperti cacat penglihatan, pendengaran ataupun bagian tubuh yang hilang.

Anak-anak cenderung menjadi korban karena mereka lebih kecil dan tidak memiliki kekuatan dalam perang. Kurangnya obat-obatan, nutrisi, asupan makanan dan minuman yang bersih membuat prosses penyembuhan berjalan lambat dan cenderung menjadi buruk. Kerugian yang didapat oleh anak semakin banyak apabila mereka mengalami cacat pada bagian tubuh mereka. Mereka tidak bisa membantu keluarga dan bahkan menambah beban keluarga dalam situasi konflik. Gangguan fisik juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan yang kotor dan asupan nutrisi dan makanan yang kurang sehat dapat menimbulkan penyakit. Dan apabila penyakit itu berada ditempat pengungsian,

dapat menular kepada warga pengungsi lain yang berada di tempat tersebut. Hal ini sudah sering terjadi pada situasi konflik disuatu negara. Dikonflik Israel-Palestina sendiri sudah sangat banyak warga dan anak pada khususnya yang meninggal akibat sakit. Sudah seharusnya ada lembaga yang siap bersedia menyediakan fasilitas yang layak bagi penyembuhan anak-anak yang sakit atau cedera.

Dampak perang terhadap kesehatan anak tidak hanya pada kesehatan fisik akan tetapi juga pada kesehatan mental dan psikologis anak. Memang pada umumnya konflik bersenjata ditandai dengan kekerasan fisik dan anak-anak mungkin bisa saja terluka seperti yang sudah dijelaskan diatas. Akan tetapi hal itu berlanjut kepada mental seorang anak apabila melihat teman, saudara dan atau keluarga terluka, kehilangan anggota tubuh atau terbunuh dalam perang yang disaksikannya secara langsung. Hal ini dapat mengganggu psikologis seorang anak. Bisa jadi anak tersebut menjadi trauma dan memiliki efek jangka panjang. Atau mungkin akan muncul rasa dendam dalam diri yang akan di bawa sampai tumbuh besar nanti. Pengaruh mental yang diakibatkan oleh trauma dapat merubah sifat, karakter dan perilaku seorang anak.

Bukan hanya kesehatan mental anak-anak saja yang terkena dampak dari perang, orang dewasa yang merawat anak pun bisa terpengaruh mental mereka. Pada masa konflik, tingkat kekerasan dalam keluarga bisa saja meningkat karena adanya trauma, tekanan ekonomi dan faktor lain yang memicu kekerasan dalam keluarga (Salvage, 2007, p. 8). Ketika kekerasan dalam keluarga meningkat akibat kondisi perang, kesehatan mental anak pun mulai bertambah dan semakin

tertekan. Hal ini membutuhkan adanya terapi dari pihak-pihak ahli yang mengerti tentang psikologis anak atau semacamnya.

Dari kelima penjelasan mengenai masalah yang diterima oleh anak dalam kondisi perang diatas dapat dilihat bahwa masih sangat banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pihak yang berperang. Negara-negara yang ikut berperang sudah seharusnya tahu mengenai peraturan-peraturan dalam perang dan hukum humaniter yang menjelaskan bahwasannya tidak boleh melukai warga sipil. Namun hal itu sulit untuk ditaati apabila berada dalam situasi konflik karena negara yang berperang semuanya ingin menang, sehingga memakai segala cara walaupun itu melanggar hak kemanusian dan lain-lain. Dampak jangka panjang akibat perang terhadap anak ini tak bisa dilupakan oleh mereka sampai kapanpun, karena mereka kehilangan banyak hal akibat perang. Dibutuhkan lembaga atau negara dalam membantu melindungi para korban perang khususnya anak-anak agar mereka dapat mendapatkan hak-hak mereka secara layak dan adil.